



PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

NOMOR : 45/KPN.W12-U24/SK.HM1.1.1/II/2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
PADA
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi IV huruf A, B, C, D, E, F, G dan H Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, perlu ditetapkan daftar informasi publik oleh Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 144/KPN.W12-U24/SK.HM1.1.1/VII/2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Layanan Informasi Pengadilan Negeri Banyumas;

KEDUA..

- KEDUA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 2 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS,


ANDITA YUNI SANTOSO 

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas

Nomor : 45/KPN.W12U24/SK.HM1.1.1/II/2026

Tanggal : 2 Februari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

A. Informasi Berkala

Pengadilan Negeri Banyumas menyediakan dan mengumumkan jenis informasi berikut secara berkala:

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

a. Profil Pengadilan;

- 1) tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan;
- 2) struktur organisasi Pengadilan;
- 3) alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el Pengadilan;
- 4) profil singkat pimpinan Pengadilan;
- 5) profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 6) daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; dan
- 7) lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.

b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;

c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak Kepaniteraan lain;

d. Agenda Sidang.

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

a. Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan (Hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam persidangan);

b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun secara elektronik;

c. Hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan aparatur Pengadilan;

d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informasi;

e. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;

f. Biaya perolehan salinan informasi:

- 1) Informasi elektronik diberikan tanpa biaya;

2)..

- 2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikarenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi juga menggunakan sarana berbayar.
3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Instansi
 - a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling kurang terdiri atas;
 - 1) nama program dan kegiatan;
 - 2) penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi;
 - 3) target dan/ atau capaian program dan kegiatan;
 - 4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - 5) sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
 - b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) & Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit BPK;
 - d. Ringkasan daftar aset dan inventaris;
 - e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.
4. Informasi Laporan Akses Informasi
 - a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
 - b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
 - c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;
 - d. Alasan penolakan permohonan informasi.
5. Informasi Lain.

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

B. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

1. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik;
2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi;
3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular.

C. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

1. Informasi Umum;
2. Informasi tentang perkara;
3. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan;
4. Informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian;
5. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan.

D. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan

1. Informasi dalam proses Musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
2. Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
3. SKP dan evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait pelaporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
5. Identitas Hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu;
8. Berita acara sidang dan alat bukti.

E. Informasi yang tidak dapat diberikan

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
3. Informasi yang berkaitan dengan hak dan/atau Data Pribadi;
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
6. Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan SK KMA No. 2-144/SK/KMA/VIII/2022.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS,



ANDITA YUNI SANTOSO

LAMPIRAN II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas
Nomor : 45/KPN.W12-U24/SK.HM1.1.1/II/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2026

No.	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
1.	Profil Pengadilan	Kesekretariatan	Kasubbag. PTIP	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy	1 Tahun	-
2.	Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan	Kepaniteraan	Panitera Muda Perdata/ Panitera Muda Pidana	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
3.	Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak Kepaniteraan lain	Kepaniteraan	Panitera Muda Perdata	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-

4.	Agenda Sidang	Kepaniteraan	Panitera Muda Perdata/ Panitera Muda Pidana	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
5.	Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan (Hak mendapat bantuan hukum, hak atas kebebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam persidangan)	Kepaniteraan	Panitera Muda Hukum	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
6.	Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun secara elektronik	Kepaniteraan	Panitera Muda Hukum	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
7.	Prosedur Memperoleh Informasi	Kepaniteraan	Panitera Muda Hukum	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
8.	Program dan Kegiatan DIPA	Kesekretariatan	Kasubbag. Umum Dan Keuangan	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
9.	SAKIP	Kesekretariatan	Kasubbag. PTTP	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
10.	Laporan Keuangan	Kesekretariatan/Kepaniteraan	Kasubbag. Umum dan Keuangan	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-

11.	Daftar Aset dan Inventaris	Kesekretariatan	Kasubbag. Umum dan Keuangan	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
12.	Pengadaan Barang dan Jasa	Kesekretariatan	Kasubbag. Umum dan Keuangan	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
13.	Laporan Informasi Publik	Kesekretariatan	Kasubbag. PTIP	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
14.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.						
15.	Putusan dan Penetapan Pengadilan	Kepaniteraan	Panitera Muda Hukum	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
16.	Informasi Perkara	Kepaniteraan	Panitera Muda Hukum	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
17.	Data Statistik Perkara	Kepaniteraan	Panitera Muda Hukum	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
18.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Kebijakan pimpinan	Panitera/Sekretaris	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
19.	Profil Hakim Dan Pegawai	Kesekretariatan	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
20.	Data statistik kepegawaian	Kesekretariatan	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-

21.	Surat perjanjian dengan pihak ketiga	Kesekretariatan /K epaniteraan	Panitera/ Sekretaris	3 Januari 2026 PN Banyumas	Softcopy; Hardcopy	1 Tahun	-
-----	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	---------	---

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS,

ANDITA YUNI SANTOSO

